



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tata Kelola Desa Wisata melalui Literasi Fiskal dan Kepatuhan Perpajakan

Sosialisasi bagi pengelola dan pelaku usaha Desa Wisata Sangurejo — Kampung Pramuka



Sabtu, 4 Juli 2026



Pukul 13.00 WIB



Desa Sangurejo, Turi, Sleman, DIY

Oleh: Suci Damayanti



Agenda Pembahasan



Profil & Potensi Desa Wisata Sangurejo

Mengenal Kampung Pramuka dan peluang ekonominya



Tantangan Tata Kelola Keuangan

Refleksi dari kegiatan pengabdian sebelumnya



Konsep Literasi Fiskal & Kepatuhan Pajak

Definisi, jenis pajak, dan kewajiban pelaku usaha



Simulasi & Praktik Perhitungan Pajak

Contoh penerapan untuk UMKM desa wisata



Rencana Tindak Lanjut

Program pendampingan berkelanjutan

Narasumber

Dosen Hukum Pajak

Fokus Kajian:

Hukum & Kepatuhan Perpajakan
UMKM dan Desa Wisata



Metode: Sosialisasi partisipatif & simulasi

Mengenal Desa Wisata Sangurejo

*Dusun Sangurejo, Desa Wonokerto,
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY*

2016

diresmikan sebagai Desa Wisata
Community Based Tourism



Kampung Pramuka

1 dari 9 Kampung Pramuka yang dimiliki Pemerintah DIY



Kampung Iklim (Proklam)

Dideklarasikan 26 Februari 2023, mendukung ketahanan iklim



Daya Tarik Utama

Embung Kaliaji, wisata edukasi, outbound, agrowisata kebun salak



Lini Usaha Beragam

Camping ground, kuliner, penyewaan tempat makrab & perkemahan

Potensi besar, tata kelola yang kuat adalah kuncinya

Besarnya lini usaha menunjukkan potensi pendapatan yang sangat profitable — namun bisnis berskala besar membutuhkan tata kelola keuangan dan kepatuhan pajak yang tertib agar berkelanjutan.

Refleksi: Tantangan Tata Kelola Keuangan

Temuan dari kegiatan pengabdian sebelumnya mengenai audit internal & sistem pengendalian keuangan Desa Wisata Sangurejo



Pencatatan Belum Sistematis

Transaksi tiket, sewa, dan UMKM masih dicatat manual dan tidak konsisten.



Laporan Keuangan Tidak Terstandar

Belum ada format baku laporan laba-rugi, neraca, maupun arus kas.



Pengendalian Internal Lemah

Belum ada SOP alur keuangan: pencatat, penyetuju, dan pemegang kas.



Kapasitas SDM Terbatas

Pengelola belum terbiasa dengan akuntansi maupun manajemen keuangan.



Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan perlu diperluas hingga ke aspek perpajakan — agar legalitas usaha dan kontribusi fiskal desa wisata turut tertata.



Mengapa Literasi Fiskal Penting bagi Desa Wisata?



Legalitas Usaha

NPWP dan kepatuhan pajak memperkuat status hukum Pokdarwis, UMKM, dan BUMDes.



Kepercayaan Mitra & Wisatawan

Usaha yang tertib pajak lebih dipercaya oleh mitra bisnis dan lembaga pembiayaan.



Akses Pembiayaan & Hibah

Banyak skema bantuan pemerintah mensyaratkan bukti kepatuhan pajak (NPWP/SPT).



Kontribusi Pembangunan Daerah

Penerimaan pajak dan retribusi mendukung pembangunan infrastruktur desa wisata.

Dua Konsep Kunci

Memahami perbedaan dan keterkaitannya



Literasi Fiskal

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta kemampuan menerapkannya dalam pengelolaan keuangan usaha sehari-hari.

- Memahami manfaat pajak bagi pembangunan
- Mengetahui jenis & tarif pajak yang relevan
- Mampu menghitung kewajiban pajak sederhana



Kepatuhan Perpajakan

Perilaku nyata wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku — mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu.

- Mendaftarkan diri memperoleh NPWP
- Menghitung & membayar pajak terutang
- Melaporkan SPT sesuai batas waktu



Jenis Pajak & Retribusi yang Relevan

Bagi Pokdarwis, UMKM kuliner, dan BUMDes pengelola Desa Wisata Sangurejo



PPh Final UMKM

Tarif 0,5% dari omzet bruto per bulan (PP No. 55 Tahun 2022), berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar/tahun.



Pajak Daerah / Retribusi Wisata

Retribusi tempat rekreasi & pajak barang/jasa tertentu (kuliner, parkir) sesuai Perda Kabupaten Sleman.



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dikenakan atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk fasilitas wisata secara komersial.



NPWP & Kewajiban Pelaporan

Prasyarat administrasi untuk pendaftaran, pelaporan SPT, dan akses insentif/pembiayaan usaha.



Kewajiban Perpajakan per Subjek Usaha

Peta kewajiban bagi masing-masing pelaku pengelolaan Desa Wisata Sangurejo

Subjek	Jenis Pajak Utama	Kewajiban Pokok
Pokdarwis / Pengelola Wisata	PPh Final UMKM, Retribusi Tempat Wisata	NPWP badan/usaha, setor & lapor bulanan, pembukuan sederhana
UMKM Kuliner & Kerajinan	PPh Final UMKM 0,5%	NPWP pribadi/usaha, catat omzet harian, setor pajak bulanan
BUMDes	PPh Badan / PPh Final sesuai omzet	NPWP badan, laporan keuangan tahunan, SPT Tahunan Badan
Pengelola Camping Ground & Sewa Tempat	Pajak Daerah atas Jasa Tertentu	Pendaftaran ke Bapenda, pelaporan transaksi sewa

Pencatatan Rapi, Dasar Kepatuhan Pajak

Tata kelola keuangan yang tertib mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan



Pencatatan Transaksi

Setiap tiket, sewa, dan penjualan dicatat harian secara konsisten.



Laporan Keuangan Standar

Disusun laporan laba-rugi & arus kas sesuai SAK EMKM.



Pengendalian Internal

Otorisasi dan audit internal menjaga akurasi data omzet.



Pelaporan Pajak Akurat

Omzet yang tercatat benar menjadi dasar perhitungan pajak yang tepat.



Program pengabdian sebelumnya membangun fondasi pencatatan & pengendalian keuangan — sosialisasi ini melanjutkan dengan menautkannya pada kewajiban dan literasi perpajakan.



Simulasi Perhitungan PPh Final UMKM

Contoh penerapan tarif 0,5% dari omzet bruto bulanan (PP No. 55 Tahun 2022)

Jenis Usaha	Omzet per Bulan	PPh Final (0,5%)
Usaha Kuliner Desa Wisata	Rp 12.000.000	Rp 60.000
Penjualan Tiket & Wisata Edukasi	Rp 25.000.000	Rp 125.000
Penyewaan Camping Ground	Rp 8.000.000	Rp 40.000

Rumus Sederhana

$$\text{Omzet Bruto Bulanan} \times 0,5\% = \text{PPh Final Terutang}$$

Manfaat Kepatuhan Pajak bagi Desa Wisata



Legalitas & Perlindungan Usaha

Terhindar dari sanksi administratif dan memperkuat status hukum usaha.



Kepercayaan Wisatawan & Mitra

Reputasi desa wisata meningkat di mata investor dan mitra kerja sama.



Akses Pendanaan & Insentif

Membuka peluang hibah, kredit usaha, dan program bantuan pemerintah.



Kontribusi Pembangunan Desa

Penerimaan pajak mendukung infrastruktur dan fasilitas wisata setempat.

Tantangan yang Perlu Diantisipasi



Keterbatasan Pemahaman SDM

Pengelola belum familiar dengan istilah dan prosedur perpajakan dasar.



Sarana Pendukung Minim

Keterbatasan perangkat teknologi informasi dan dokumentasi keuangan.



Pencatatan Omzet Belum Konsisten

Data transaksi yang belum rapi menyulitkan penghitungan pajak akurat.



Belum Ada Pendampingan Rutin

Minimnya pendampingan berkelanjutan pasca sosialisasi sebelumnya.



Rangkaian Materi & Pendampingan

Tahapan pelaksanaan program literasi fiskal Desa Wisata Sangurejo

TAHAP 1

Sosialisasi Dasar Perpajakan

Pengenalan NPWP, jenis pajak, dan manfaat kepatuhan bagi usaha wisata.



TAHAP 2

Pendampingan Pendaftaran NPWP

Fasilitasi pendaftaran NPWP bagi Pokdarwis, UMKM, dan BUMDes.



TAHAP 3

Pelatihan Pencatatan & Perhitungan

Simulasi pencatatan omzet dan perhitungan PPh Final 0,5%.



TAHAP 4

Simulasi Pelaporan SPT / e-Filing

Praktik pelaporan pajak sederhana secara daring.



TAHAP 5

Monitoring & Pendampingan Berkala

Evaluasi implementasi dan pendampingan lanjutan tiap triwulan.





Rencana Tindak Lanjut

Keberlanjutan program pasca kegiatan sosialisasi

1 Bulan

Jangka Pendek

- Pendampingan pendaftaran NPWP bagi Pokdarwis & UMKM
- Pembentukan grup komunikasi daring literasi fiskal

3–6 Bulan

Jangka Menengah

- Pelatihan lanjutan pencatatan omzet & e-Filing sederhana
- Evaluasi berkala pemahaman & kepatuhan peserta

> 6 Bulan

Jangka Panjang

- Pembentukan kader literasi fiskal desa wisata
- Kerja sama berkelanjutan dengan KPP Pratama Sleman



Terima Kasih

Mari bersama mewujudkan tata kelola Desa Wisata Sangurejo yang transparan, akuntabel, dan taat pajak

Desa Sangurejo, Kampung Pramuka — Turi, Sleman, DIY

Sabtu, 4 Juli 2026 • 13.00 WIB